

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kajian perumusan masalah, tujuan penelitian, serta temuan yang membahas hubungan antara tenaga kerja IMK, realisasi pengeluaran APBD, dan investasi dalam negeri terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, menghasilkan kesimpulan, Selama periode 2013 hingga 2022, rata-rata tingkat kemiskinan nasional Indonesia berada di angka 10%, dengan Papua dan Papua Barat mencatatkan angka kemiskinan tertinggi, sementara Kepulauan Bangka Belitung dan Bali menunjukkan angka kemiskinan yang relatif rendah, mencerminkan adanya ketimpangan regional antar wilayah di Indonesia. Di sisi lain, variabel tenaga kerja IMK, APBD, dan investasi secara nasional menunjukkan peningkatan yang signifikan selama periode yang sama, mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang positif dan berkelanjutan. Secara simultan, semua variabel bebas, yaitu tenaga kerja IMK dan realisasi APBD, memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Selain itu, investasi dalam negeri sebagai variabel kontrol juga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan, mempertegas perannya dalam upaya penurunan angka kemiskinan di tingkat nasional.

5.2 Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar pemerintah pusat dan daerah baik di provinsi hingga kabupaten/ kota di Indonesia memberikan perhatian lebih pada penguatan sektor industri mikro dan kecil (IMK), mengingat tenaga kerja di sektor ini memiliki pengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan dimana hal ini dapat mendorong usaha mikro dan kecil semakin berkembang sehingga serapan tenaga kerja yang dibutuhkan akan semakin besar. Langkah strategis dapat mencakup peningkatan akses pembiayaan, pelatihan keterampilan, serta pengembangan infrastruktur yang mendukung produktivitas usaha IMK. Upaya pemasaran juga dapat menjadi faktor penting dalam keberlanjutan IMK, pemerintah dapat berperan dalam memperluas pasar bagi produk IMK untuk meningkatkan permintaan produksi terhadap IMK. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat sektor Industri Mikro dan Kecil (IMK) karena kontribusinya yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan. Langkah strategis meliputi peningkatan akses pembiayaan, pelatihan keterampilan, pengembangan infrastruktur, dan perluasan pasar produk IMK untuk meningkatkan permintaan. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat penting. Pemerintah dapat memberikan insentif pajak, subsidi, dan pelatihan; swasta dapat membuka program magang, bermitra dengan UMKM, serta menyediakan pembiayaan mikro; sementara masyarakat dapat mendukung produk lokal, mempromosikan usaha mikro, dan membentuk kelompok usaha bersama. Selain itu, pengeluaran APBD harus difokuskan pada program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.
2. Realisasi pengeluaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) perlu diarahkan secara lebih strategis untuk program-program yang dapat memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Untuk pemberdayaan

ekonomi, pengeluaran APBD dapat difokuskan pada program pelatihan keterampilan, dukungan terhadap usaha mikro dan kecil (IMK), serta pengembangan sektor-sektor ekonomi lokal yang berpotensi untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki akses pasar bagi produk lokal, memperkenalkan teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas, atau memberikan insentif bagi pelaku usaha kecil yang menyerap tenaga kerja lokal. Dengan mengarahkan pengeluaran APBD pada sektor-sektor ini, pembangunan dapat lebih terfokus pada kebutuhan masyarakat yang mendasar, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi antar daerah.

3. Optimalisasi investasi dalam negeri juga perlu ditingkatkan dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong sektor industri mikro kecil yang dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat miskin. Dengan pendekatan terpadu antara pengembangan IMK, efisiensi belanja publik, dan peningkatan investasi, diharapkan pengentasan kemiskinan di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
4. Selain itu, diperlukan juga penelitian lebih lanjut guna memperkaya hasil penelitian yang berkaitan dengan topik ini dan memahami dinamika variabel-variabel ini dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kemiskinan secara mendalam. Dikarenakan masih kurangnya pengembangan peneliti, akibat kekurangan dan kendala yang terjadi selama penelitian. Hal ini ditujukan agar dengan menambahkan variabel-variabel baru pada penelitian, peneliti masa depan akan memperluas cakupan penelitian ini.